

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia perpolitikan, partisipasi menjadi suatu bentuk aktivitas yang mampu berhubungan baik antara individu, kelompok, dan organisasi guna menjadikan suatu sistem saling berkaitan satu sama lain dalam mencapai tujuan tertentu. Partisipasi pun menjadi suatu tindakan yang mampu mencapai tujuan bersama sebagai konstruksi sosial yang dapat diharapkan menjadi kegiatan bersama dalam dunia politik.

Proses analisa politik modern ditinjau dari tingkat partisipasi politik yang menjadi suatu indikator dari negara berkembang sebagai negara yang mampu menjalankan demokrasi untuk mendewasakan negara dan warganya supaya mampu mempengaruhi keputusan politik yang terdapat dinamika gerakan sosial (Budiardjo, 2010).

Sejarah Indonesia, sebagai negara yang memiliki keterkaitan kuat dengan aktivisme mahasiswa yang mampu memberikan perubahan penting dalam sejarah pembangunan Indonesia. Di sini terlihat seperti gerakan mahasiswa yang bisa merubuhkan rezim Soeharto di tahun 1998 dengan gelombang demonstrasi mahasiswa yang telah dilakukan secara flutuaktif sesuai dengan reaksi atas keprihatinan

Dalam proses pembentukan negara tidak terlepas dengan sejarah aktivisme pemuda, khususnya dari aktivis mahasiswa yang berpartisipasi aktif di dalam perubahan penting sejarah Indonesia dalam merebut kemerdekaan sampai melakukan pembangunan nasional (Kristeva N. S., 2014).

Gelombang gerakan mahasiswa diprakarsai melalui organisasi Budi Oetomo yang merupakan kumpulan pemuda terpelajar dari pelajar yang belajar di dalam negeri maupun yang di luar negeri, kemudian berhimpun menjadi suatu wadah gerakan politis dalam memerdekakan bangsa Indonesia. Pasca kemerdekaan pun di era orde lama pun masih memberikan gerakan mahasiswa dikarenakan menilai pemerintahan Soekarno terlalu populis dan terlalu otoriter dan dekat dengan PKI.

Orde baru pun tidak terlepas dari gerakan mahasiswa yang memang terdapat sistem pemerintahan yang diktator dan berlaku sewenang-wenang selama kepemimpinannya 32 tahun tersebut sampai akhirnya di reformasi. Era reformasi pun masih terdapat banyaknya gerakan mahasiswa yang mengawal demokrasi khususnya ketika pembentukan Omnibus Law, RUU KPK, RUU KHUP, dan sebagainya (Prasetyo, 2015).

Gerakan mahasiswa tersebut dinilai sebagai tingkat partisipasi politik parokial yang melihat dinamika strata politik terhadap kebijakan yang dikeluarkan sebagai manifestasi peranan aktif mahasiswa terhadap negara, bukan hanya menjadikan mahasiswa yang haus akan keilmuan masing-masing dan diimplementasikan kepada kepentingan rakyat.

Dari analisa sistem politik dari partisipasi politik menjadikan indikator yang bisa mengukur kemajuan pada proses yang berlangsung di negara tertentu. Samuel Huntington menjelaskan partisipasi politik pada sebuah negara adalah ciri khas pada modernisasi politik maka masyarakat modern selalu berpikiran aktif bergerak sebagaimana ia dan juga organisasinya bisa memberikan pengaruh pada penekanan pemerintahan dalam setiap kebijakan yang diputuskan oleh proses yang memberikan pengaruh disebut partisipasi politik (Budiardjo, 2010).

Sikap politik mahasiswa bisa dikatakan menjadi calon pemimpin di masa yang akan datang sebagai proses mencetak daya nalar dan analisa yang mempunyai dalam meningkatkan keterampilan khusus dalam kepemimpinan, salah satunya yakni dengan mengikuti organisasi-organisasi yang berada di tingkatan fakultas maupun universitas.

Keterlibatan mahasiswa yang melihat adanya tatanan ketatanegaraan untuk menjadi jargon maupun pilar utama yang menjadi jalinan tatanan demokrasi di Indonesia sebagai salah satu pilar dari peran mahasiswa yakni *agent of change* dan *agent social of control* dalam meningkatkan keadilan masyarakat yang ditingkatkan dari kualitas maupun kuantitas masyarakat yang sudah semestinya diperhitungkan.

Mahasiswa ialah bagian dari masyarakat yang berintelektual yang mampu berdiaspora dengan keadaan dalam mengarungi kehidupan bermasyarakat dan mampu merasakan kegelisahan dari masyarakat yang mereka wakili

kepentingannya yang secara jelas tertindas. Hal ini menjadi suatu dorongan bagi mahasiswa untuk melakukan aksi demonstrasi yang mengakomodir keluhan masyarakat yang merasa tertindas oleh sistem, dan mampu menyalurkan aspirasi mereka berdasarkan argumentasi ideologis demi perubahan sistem politik yang ada.

Edward Shill (1995) mengategorikan kaum intelektual yang biasa disebut mahasiswa sebagai representasi sebagian tanggung jawab sosial yang mewakili kepentingan masyarakat yang khas. Terdapat lima fungsi dari mahasiswa yaitu: membentuk dan menjaga kebudayaan tinggi, mengadakan bagan nasional dan bangsa, memberdayakan kebersamaan, mempengaruhi dinamika sosial sebagai perubahan politik. Dalam melihat mahasiswa yang memiliki kecenderungan keterlibatan tiga fungsi terakhir menjadikan kaum intelektual di perkotaan menjadi bagian yang mendorong perubahan politik yang disebut reformasi (Kristeva N. S., 2015).

Menurut Arbi Sanit dalam (Lane, 2007) terdapat empat faktor yang mempengaruhi peningkatan peran mahasiswa dalam konfigurasi politik di Indonesia khususnya pada kalangan perkotaan, yaitu: Pertama, sebagai manifestasi masyarakat yang mengenyam pendidikan terbaik yang mampu mendapatkan horison luas dibanding masyarakat lainnya. Kedua, sebagai kelompok yang paling lama mengenyam pendidikan sampai jenjang universitas dan telah mendapatkan sosialisasi politik. Ketiga, kehidupan kampus yang mampu membentuk gaya hidup mahasiswa, sebab dunia kampus berasal dari multikultural yang mampu menjalin nilai toleransi dan keberagaman di antara mahasiswa. Keempat, mahasiswa menjadi kelompok yang masuk kepada tatanan kekuasaan, ekonomi, dan dalam prestise masyarakat sebagai elit kalangan muda (Gaffar, 2010).

Aksi parlemen jalan atau sebagai istilah yang dipakai kalangan mahasiswa untuk mendemonstrasikan tuntutan kekuatan moral yang digunakan mahasiswa sebagai bukan bagian dari organisasi sosial politik yang memiliki kepentingan praktis. Komitmen mahasiswa yang masih memegang teguh entitas moral berdasarkan dinamika sosial politik yang berlandaskan ilmu pengetahuan sebagai ciri khusus dari mahasiswa. Maka dengan politik mahasiswa tersebut dikatakan

sebagai etika moral yang menjadi dasar sikap dan perilaku mahasiswa untuk menjadikan dirinya sebagai gerakan politik idealis (Prasetyo, 2015).

Mahasiswa dirasa memerlukan pembinaan basis kekuatan serta jaringan yang mampu mengorganisir setiap gerakan supaya tidak terkotak-kotakan dengan kerangkeng ideologi masing-masing ideologi maupun kelompok, maka perlu adanya penyatuan kesepahaman kepentingan guna membela kepentingan rakyat. Sebab menggunakan kekuatan yang terdiaspora akan membuat rezim mampu dengan mudah mematahkan gerakan sporadis dari mahasiswa. Gerakan mahasiswa mesti terkoneksi dengan seluruh elemen masyarakat seperti buruh, petani, nelayan, keagamaan, perkumpulan profesi, dan sebagainya. Tujuan dari barisan ekstra parlementer tersebut untuk menyusun kekuatan yang terorganisir dengan potensi kekuatan yang dimiliki sebagai pemberdayaan yang mewujudkan perubahan sosial politik yang diinginkan.

Peranan demokrasi mahasiswa pun ternyata bisa diimplementasikan kepada pemilihan kepemimpinan tingkat mahasiswa, seperti pemilihan Senat Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa. Sedangkan di kampus PTKI ada Senat Mahasiswa (SEMA), Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), dari tingkat jurusan sampai tingkat universitas.

Ridwan Saidi menyebutkan mahasiswa pada dasarnya memiliki persepsi politik yang terbentuk dari arus informasi yang dicernanya sehari-hari, melalui proses pertukaran pikiran dengan sesama rekan yang berlangsung secara tidak sengaja dalam kehidupan sehari-hari, realitas kehidupan kemasyarakatan yang dapat direkamnya. Ekspresi atau ungkapan, dan persepsi politik yang dimiliki seseorang tergantung dari individu yang bersangkutan. Mereka dapat saja menjadi relutant, bahkan apatis sekalipun dengan kehidupan politik (Maridjan, 2008).

Politik kampus yang terjadi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung bukan tanpa alasan begitu saja terjadi, akan tetapi ada labelisasi dari beragam ahli yang mengatakan bahwa di UIN Sunan Gunung Djati Bandung itu merupakan miniatur politik Indonesia, dengan sistem politik yang ada di UIN Sunan Gunung Djati Bandung ini mirip dengan sistem politik Indonesia, dengan hanya perbedaan antara *parliamentary* yang digunakan di UIN dan sistem *one men one vote* dengan tetap

menggunakan sistem kepartaian seperti yang dilakukan di UIN dengan organisasi mahasiswa ekstra sebagai partai politiknya.

Sejak didirikannya FISIP di tahun 2012 pun sudah ada narasi mahasiswa “netral” yang tidak mengikuti organisasi mahasiswa ekstra baik HMI, PMII, HIMA PERSIS, IMM, dan sebagainya. Para mahasiswa yang mengordinir dirinya ke dalam barisan netral pun membentuk suatu perkumpulan supporter dengan dalih mendukung jurusan dalam perhelatan olahraga, tapi pada akhirnya mereka mengumpulkan gagasan untuk merebut kepengurusan HMJ yang ada di FISIP, terbukti sejak 2019-2023 di jurusan AP, Sosiologi pun dipegang oleh supporter jurusan baik dari AP ada Brigade AP, di Sosiologi ada Casual, dan hanya di Ilmu Politik dipegang oleh ekstra baik HMI maupun PMII.

Sikap politik dari mahasiswa kepada negara, pasti diawali oleh sikap politik terhadap pengorganisasian lembaga kampus yang sudah diwadahi dan diatur oleh peraturan yang ada, misalnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, dari tingkatan jurusan ada yang namanya HMJ dengan bentuk pemilihannya Musyawarah Komisariat (muskom), di tingkatan fakultas sampai universitas ada Musyawarah Mahasiswa (musma) untuk menentukan DEMA-F dan DEMA-U, ada juga Musyawarah Tinggi (Musti) untuk menentukan SEMA-F dan SEMA-U.

Fenomena yang terjadi di FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dalam agenda pagelaran demokrasi ditingkat fakultas, peran Perempuan dan keterlibatannya dapat dinilai kurang. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya partisipasi Perempuan dalam mencalonkan diri sebagai pimpinan organisasi. Perempuan di FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung banyak terlibat hanya pada penyelenggara atau pelaksana teknis.

Di dalam organisasi ekstra pun masih terjadi bias gender mengenai keterlibatan perempuan dalam proses konsolidasi politik penentuan arah gerak politik organisasi. Padahal sikap politik perempuan sebetulnya jauh lebih efisien dalam menimbang keputusan yang akan ditujukan, hal ini terjadi bias gender dan menjadikan perempuan sebagai *second human* yang dirasa kurang mampu. Akan

tetapi ada juga organisasi mahasiswa ekstra yang melibatkan perempuan dalam proses konsolidasi politik.

Dalam dinamika politik yang terjadi di FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung peran organisasi ekstra kampus sangat mendominasi dalam menentukan pemimin organisasi intra di Fakultas FISIP. Hal tersebut dapat dilihat dari kader-kader organisasi ekstra menempati jabatan yang strategis di organisasi intra. Peneliti mengambil salah satu contoh dari keorganisasian Senan Mahasiswa (SEMA) FISIP yang menjabat sebagai ketua merupakan kader PMII Kota Bandung, Sekjennya kader PMII Kabupaten, dan sisa komisinya dari kader HMI, PMII Kota, PMII Kabupaten, dan salah satu delegasi suporter sosiologi (casual). Fenomena yang menariknya ialah tidak adanya perempuan yang menjabat sebagai anggota SEMA FISIP, sedangkan dalam badan *ad hoc* pembentukan SEMA FISIP terdapat panitia perempuan.

Fenomena lain yang terjadi terdapat Pada lembaga Dewan Mahasiswa (DEMA) FISIP yang dominasi laki-laki, baik Ketua, Skertaris umum, dan beberapa Ketua Bidang. Walaupun ada perempuan yang menjadi Bendahara Umum, Ketua Bidang Pengembangan Intelektual, Ketua Bidang Ekonomi, Sekretaris Bidang Pengembangan Aparatur Organisasi, akan tetapi jika ditinjau dari rasio 30% keterwakilan perempuan yang menjadi pemegang kebijakan di masing-masing bidang masih kurang jumlah keterwakilan perempuan pada bidang yang ada.

Di beberapa HMJ pun baik di Ilmu Politik misalnya yang menjadi Sekretaris umum dan Ketua Bidang Sosial Advokasi perempuan, tetapi yang menjadi Ketua Bidang lainnya masih terdapat dominasi laki-laki. Di HMJ Administrasi Publik pun hanya terdapat Bendahara Umum, Ketua Bidang agama, dan Ketua Bidang Kominfo yang berasal dari perempuan dari total 10 pucuk pimpinan HMJ-AP. Di HMJ Sosiologi pun hanya ada Bendahara Umum dan Kabid Kewirausahaan. Artinya hal tersebut belum memenuhi kuota 30% perwakilan perempuan akumulasi keseluruhan di dalam struktur organisasi intra kampus yang menjadi pimpinan lembaga baik SEMA FISIP, DEMA FISIP, HMJ Ilmu Politik, HMJ Sosiologi, dan HMJ AP. Dari beberapa lembaga tersebut yang tidak ada representasi aktivis dari kader organisasi mahasiswa ekstra kampus yakni di HMJ Sosiologi dan HMJ AP.

Politik kampus di UIN Sunan Gunung Djati Bandung semenjak dikeluarkannya SK Dirjen 2016 yang mengatur segala aktivitas politik mahasiswa pun pada akhirnya meruncing pada sikap politik seluruh mahasiswa di UIN Sunan Gunung Djati Bandung baik yang aktif di dalam organisasi ekstra kampus seperti Aliansi Cipayung Plus (PMII, HMI, GMNI, HIMA PERSIS, KAMMI, GMNI, IMM, DLL), maupun mahasiswa yang bukan aktivis pun pada akhirnya melek politik dikarenakan dinamika politik kampus yang terdiaspora hingga pada tataran dalam pemilihan kosma di kelas masing-masing, dikarenakan kosma yang menjadi delegasi di setiap musyawarah komisariat (muskom) pemilihan HMJ, dan HMJ terpilih ini yang memilih DEMA maupun SEMA di tataran fakultas dan universitas.

Dari 74 orang yang terdapat daala kepengurusan HMJ Sosiologi periode 2022-2023 ada 37 orng perempuan yang masuk dalam struktur kepengurusan. Jika ditinjau dari latarbelakang organisasi ekstra kampusnya, makatidak terdapat perempuan kader organisasi ekstra yang masuk dalam kepengurusan HMJ Sosiologi tahun 2023-2024. Selanjutnya terdapat di HMJ Administriasi Publik yang mana pada tahun 2022-2024 terdapat 62 orang pengurus dengan jumlah perempuan yang masuk dalam struktur pengurusnya berjumlah 32 orang. Dari 32 orang perempuan yangasuk kepengurusan tidak terdapat perempuan kader ekstra selama satu kepengurusan tersebut. Kejadian lainnya juga terjadi di HMJ Ilmu Politik dengan total pengurus 62 orang dengan komposisi 21 orang pengurus perempuan dan hanya 6 orang perempuan yang mempunyai latarbelakang organisasi ekstra. Selain itu lembaga intra kampus di tataran fakultas fisip tidak jauh berbeda kondisinya dengan tingkat jurusan, salah satunya DEMA Fisip dengan total engurus 73 orang dan komposisi pengurus perempuan terdapat 39 orang. Sedangkan dari total 39 orang perempuan yang masuk menjadi pengurus DEMA hanya terdapat 6 orang perempuan kader ekstra yang terakomodir didalamnya. Adapun dari lembaga SEMA Fisip dar total 7 orang anggota tidak terdapat satupun perempuan yang menjadi pengurus organisasi SEMA. Guna mempermudah memahami fenomena diatas peneliti menuangkannya dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data perempuan kader ekstra kampus yang masuk dalam intra kampus
FISIP periode 2022-2023.

Organisasi Intra	Jumlah Pengurus	Pengurus Perempuan	Pengurus Perempuan Kader Ekstra
HMJ Sosiologi	74	37	0
HMJ AP	62	32	0
HMJ ILPOL	62	21	6
DEMA Fisip	73	39	6
SEMA Fisip	7	0	0

Berdasarkan fenomena politik kampus yang terjadi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, jelas terlihat bahwa keterlibatan perempuan hanya terfokus pada pelaksana teknis saja sedangkan peran Perempuan dalam menjadi pemimpin organisasi dan menempati posisi-posisi strategis masih belum maksimal sebagaimana data observasi dari organisasi yang ada dilingkaran FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Kurangnya keterlibatan Perempuan dalam politik kampus tentunya menimbulkan sebuah ketimpangan dalam pemenuhan hak politik Perempuan. Hal tersebut tentunya menjadi fenomena yang tidak sehat karena jika analisis lebih jauh hal tersebut dapat menimbulkan stigma negative terhadap kepemimpinan Perempuan bahkan lebih buruk dapat menyebabkan stereotip perempuan tidak cocok menjadi seorang pemimpin. Hal ini tentunya harus kita hindari mengingat antara laki-laki dan Perempuan mempunyai hak yang sama dalam berdemokrasi. Berdasarkan latarbelakang tersebut peneliti akan melakukan penelitian terhadap fenomena kurangnya keterlibatan Perempuan dalam politik kampus maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui sejauhmana keterlibatan Perempuan kader organisasi ekstra dalam politik kampus, khususnya di Fakultas FISIP. Adapun judul penelitian ini adalah: **“Keterlibatan Perempuan Organisasi Ekstra Dalam Politik**

Mahasiswa Di Kampus (Studi Kasus Kader Perempuan Organisasi Ekstra Fisip Di UIN Sunan Gunung Djati Bandung”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang penelitian tentang keterlibatan perempuan organisasi ekstra dalam politik mahasiswa di kampus yang dilakukan peneliti, maka diambil beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana keterlibatan perempuan organisasi ekstra dalam politik mahasiswa Di FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung ?
2. Apa faktor-faktor yang mendorong keterlibatan perempuan organisasi ekstra dalam politik mahasiswa di FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui keterlibatan perempuan organisasi ekstra dalam politik mahasiswa Di FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong keterlibatan perempuan organisasi ekstra dalam politik mahasiswa di FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

D. Manfaat Penelitian

- 1) Kegunaan Akademis
 - a. Peneliti mengharapkan mengenai sumbangsih skripsi ini bisa menjadi penambahan pengetahuan bagi jurusan ilmu politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berkonsentrasi memberikan pemikiran mengenai peranan perempuan dalam dinamika politik kampus.
 - b. Skripsi ini pun diharapkan menjadi salah satu rujukan bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan khazanah pengetahuan mengenai peranan perempuan di dalam politik kampus.
- 2) Kegunaan praksis

- a. Mampu memberikan ruang yang lebih luas sesuai relevansi di lapangan yang diakomodir oleh skripsi ini sebagai rujukan bagi khalayak umum.
- b. Menjadi bagian penelitian yang bisa dikembangkan yang secara induktif mampu sesuai dengan prinsip dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

E. Kerangka Berfikir

Politik ialah bagian dari suatu fenomena yang berkenaan dengan manusia yang saling berinteraksi satu sama lain guna membentuk sistem kemasyarakatan yang berkembang secara dinamis mewujudkan hakikat dari makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain sebagai manifestasi dari pembentukan peradaban manusia.

Jika dilihat dari hakikatnya, manusia memang pada dasarnya sebagai inti utama dari politik itu sendiri yang memiliki penelaahan maupun pengamatan terhadap politik yang tidak meninggalkan faktor manusia sebagai piranti utama dari politik itu sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh Anton H bahwa seseorang yang memiliki kepribadian sebagai unit dasar empiris yang menjadi analisa politik.

Politik yang ideal merupakan hal yang diinginkan oleh setiap masyarakat, dimana setiap orang mempunyai perannya masing-masing dalam menopang demokrasi itu sendiri. Dalam mencapai itu semua tentunya perlu adanya partisipasi dan keterlibatan dari berbagai pihak sehingga politik dalam berdemokrasi dapat dijalankan dengan banyak sudut pandang.

Konsepsi partisipasi dalam demokrasi sangat bergantung kepada proses musyawarah yang dilakukan sebagai manifestasi nilai egaliter, tingkat musyawarah dimunculkan sebagai antitesa dari apatisme terhadap proses politik yang membentuk apolitis dari tingkat pemilihan yang rendah, hal ini terjadi akibat ketidakpuasan terhadap proses politik yang ditempuh, dan ini menunjukkan demokrasi deliberatif sebagai proses demokrasi yang pernah digunakan di jaman dahulu.

Miriam Budiarmo mendefinisikan partisipasi politik dalam pengertian yang paling umum adalah tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok guna terlibat secara partisipatif di dalam perpolitikan yang membangun kondisi

demokrasi yang sehat dengan cara menentukan sikap politik yang memilih pemimpin negara secara langsung atau tidak langsung yang memberikan konstruksi politik elektoral.

Partisipasi politik merupakan konsep dari suatu demokrasi yang menjadi katalisator penentu modernisasi di dalam politik itu sendiri yang terimplikasi dari keputusan politik yang dilakukan pemerintah guna mempengaruhi kehidupan masyarakat, sebab masyarakat berhak menentukan pengaruh keputusan politik, hal ini dikaitkan menjadi suatu partisipasi politik aktif.

Persepsi dari pemahaman politik dari masyarakat ialah mengenai peranan penting dari masyarakat itu sendiri dalam menentukan sikap politis yang akan diambil dalam mempengaruhi suatu kebijakan politik yang menyangkut kepentingan bersama.

Partisipasi Politik, jika meninjau perspektif Huntington dan Nelson menyebutkan tentang spektrum partisipasi politik terbagi menjadi beberapa bagian, yakni spektrum partisipasi politik secara otonom, dan partisipasi mobilisasi.

Partisipasi otonom yakni jenis partisipasi yang mengharapkan setiap masyarakat mampu terlibat secara aktif terlibat memberikan masukan mengenai ide dan gagasan kepada pemerintah, masuk pada dunia partai politik, atau menjadi bagian dari kelompok penekanan pada pemerintah, memberikan hak pilihnya ketika pemilihan umum, dan menjadi mitra kritis pada pemerintah.

Partisipasi politik mobilisasi menjadi partisipasi yang sangat mengedepankan manifestasi dukungan kepada masyarakat dalam pelaksanaan program secara politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi informasi yang menjadi kanal arus perputaran mobilisasi agitasi dan propaganda.